

# PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Kirdi DIPOYUDO

Pengertian dan pembatasan manapun digunakan untuk mengukur dan menganalisa pengangguran, termasuk setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, di negeri-negeri berkembang, tidak dapat diragukan bahwa pengangguran merupakan salah satu masalah pokok dunia berkembang pada dasawarsa mendatang ini. Di mana-mana semakin diakui bahwa pemecahan masalah itu bukanlah semata-mata mempercepat pertumbuhan ekonomi, biarpun laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah esensiil bagi kemajuan ekonomi dan sosial. Kenyataannya sejumlah negara berkembang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat selama dasawarsa 1960-1970 tanpa mencapai perbaikan dalam situasi kesempatan kerja. Di beberapa negara pertumbuhan ekonomi yang cepat itu bahkan terjadi kemunduran dalam situasi kesempatan kerja. Oleh sebab itu kita tidak boleh memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi semata-mata dan mengharap bahwa soal kesempatan kerja akan diselesaikan dengan sendirinya. Perluasan kesempatan kerja harus mendapatkan tempat yang sama pentingnya di samping pertumbuhan GNP sebagai sasaran sentral dalam rencana pembangunan sebagai kriterium esensiil dalam evaluasi kemajuan pembangunan. Hal ini berbeda dengan pendapat yang dominan pada awal Dasawarsa Pembangunan I,

ketika kesempatan kerja dilihat sebagai hasil sampingan pertumbuhan ekonomi dan orang mengira bahwa pengangguran dan kemiskinan, dua bencana utama dunia berkembang yang saling terjalin, akan menghilang asal laju pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan.

Strategi pembangunan yang memberikan prioritas utama kepada penempatan tenaga (employment) pada garis besarnya dirumuskan pada tahun 1964 ketika ILO menerima baik Konvensi dan Rekomendasi Kebijakanaksanaan Penempatan.<sup>1</sup> Tulisan ini akan menyajikan ringkasannya sambil menunjukkan persamaan dan perbedaannya dengan strategi pembangunan yang terarah pada peningkatan GNP yang dianut dan dilaksanakan selama ini.

Pertama, perumusan strategi penempatan harus dilihat dalam rangka perumusan strategi pembangunan yang menyeluruh. Cara pendekatan semacam ini adalah perlu untuk menentukan kebijaksanaan jangka panjang dan menengah guna menanggulangi pengangguran. Kebijakanaksanaan serupa itu, jika dipisahkan dari pertimbangan-pertimbangan pertumbuhan ekonomi, akan gagal karena perluasan kesempatan kerja dengan pendapatan yang meningkat tidak dapat dicapai di negara-negara yang mengalami stagnasi ekonomi. Program-program penempatan jangka pendek yang berdiri sendiri mungkin dapat dibenarkan sebagai tindakan sementara, tetapi program darurat semacam itu merugikan pertumbuhan jangka panjang dan perluasan kesempatan kerja, dan oleh sebab itu harus segera diintegrasikan dalam strategi pembangunan jangka panjang yang terarah pada penempatan.

Dalam merumuskan strategi pembangunan serupa itu kita hendaknya menetapkan target penyerapan tenaga kerja untuk mengarahkan kebijaksanaan pada pelaksanaannya dan secara berkala mengevaluasi kemajuan yang dicapai. Hal itu dewasa ini adalah sukar, tidak hanya sebagai akibat kurangnya konsep-konsep dan statistik yang jelas dan tepat, tetapi juga akibat

---

1 *Employment Policy and Recommendation*, No. 122 (Jenewa: ILO, 1964)

kurangnya pengetahuan tentang dampak kebijaksanaan tertentu atas penempatan tenaga jangka panjang dan pendek. Rupanya kita harus berusaha memahami secara yang lebih baik hubungan antara penempatan tenaga dan berbagai tindakan kebijaksanaan ekonomi dan sosial lainnya.

Inti strategi pembangunan yang terarah pada penempatan ialah merencanakan pertumbuhan di sektor-sektor berdasarkan teknologi yang menjamin perluasan kesempatan kerja secara maksimal, dibarengi tingkat kenaikan produksi yang wajar. Peningkatan produksi secara sektoral itu sudah barang tentu akan menaikkan GNP, tetapi pertumbuhan itu bukanlah tujuan dasar melainkan hasil kebijaksanaan yang terarah pada penempatan tenaga.

Dalam rangka seluruh pembangunan perhatian harus dipusatkan pada pembangunan pedesaan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan, tempat tinggal bagian terbesar penduduk negara-negara berkembang. Pendayagunaan tenaga kerja yang rendah akibat kurang tersedianya tanah pertanian menuntut perubahan dalam pemilikan dan pembagian tanah. Pendayagunaan tenaga kerja yang rendah karena kurang intensifnya penggunaan tanah harus diatasi dengan perbaikan pengairan dan perluasan pekerjaan, persediaan bibit unggul dan pupuk yang lebih besar, perluasan kredit dan fasilitas-fasilitas pemasaran hasil-hasil pertanian, dan peningkatan latihan petani-petani. Perpajakan tanah mungkin juga perlu ditinjau kembali, penggunaan mesin-mesin pertanian yang berat diteliti dengan saksama, dan kegiatan-kegiatan di pedesaan di luar pertanian seperti industri, kerajinan, jasa-jasa dan pembangunan dibina secara sistematis. Jika tindakan-tindakan serupa itu tidak diambil sebagai bagian program pembangunan pedesaan yang menyeluruh, pengangguran yang kini tersebar luas di pedesaan dan mendorong semakin banyak penduduk desa pergi ke kota-kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik tidak akan berkurang.

Akan tetapi baru beberapa waktu kemudian akan dirasakan sepenuhnya dampak tindakan-tindakan yang direncanakan untuk

## ANALISA

membuat daerah pedesaan lebih menarik dan untuk menolong daerah pedesaan memberikan penghidupan yang lebih baik kepada penduduknya, dan arus ke kota-kota akan berkurang. Dengan demikian dalam kebijaksanaan pembangunan yang terarah pada penempatan tenaga harus dipikirkan juga jalan untuk menaikkan tingkat penempatan dan taraf hidup massa penganggur dan setengah penganggur yang hidup dalam kemiskinan di perkampungan jembel di kota-kota. Proyek-proyek pekerjaan umum yang padat karya untuk memperbaiki perumahan dan sanitasi di daerah-daerah itu mungkin dapat ikut serta memberikan sumbangannya biarpun untuk sementara waktu. Suatu pemecahan lain yang mungkin lebih menetap sifatnya dapat diketemukan dalam perluasan kesempatan kerja yang permanen. Akan tetapi selama ini perluasan kesempatan kerja adalah lebih lamban daripada pertumbuhan produksi, terutama dalam industri, dan tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja yang semakin besar di kota-kota.

Oleh sebab itu perlu dipikirkan cara untuk memperluas kesempatan kerja dalam industri dan kegiatan-kegiatan kota lain. Ada petunjuk bahwa paling tidak dalam sementara industri cara-cara produksi padat modal sering digunakan di negara-negara berkembang dalam pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara-cara padat karya yang juga lebih murah bagi masyarakat. Oleh sebab itu harus ada jaminan bahwa teknik-teknik padat modal terbatas pada industri di mana teknik-teknik itu jelas lebih murah dan lebih efisien. Faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan modal secara berlebihan juga harus diselidiki, terutama distorsi harga-harga faktor: bunga rendah atas modal dan nilai tukar yang menguntungkan sering menjadikan pembelian mesin-mesin padat modal dari luar negeri sangat menarik. Demikianpun harus dicari keseimbangan antara keharusan memberikan upah yang wajar kepada tenaga kerja dan perlunya menghindari kenaikan biaya tenaga kerja yang tajam, yang akan mencegah penyerapan lebih banyak tenaga kerja. Kebijakan-kebijaksanaan serupa itu tidak mudah dirumuskan. Selain itu harus dilakukan usaha untuk menjamin agar perlengkapan digunakan dengan baik. Rupanya juga perlu menggalakkan pekerjaan dalam regu-regu yang bergantian dan mengatasi hambatan-hambatannya.

Untuk tindakan-tindakan itu perlu diselidiki kekurangan ketrampilan yang bisa merintangai perluasan kesempatan kerja dan produksi, dan diadakan penataran dan latihan-latihan. Tidak cukuplah memperluas kesempatan kerja kalau tenaga-tenaga kerja tidak memiliki pendidikan dasar atau ketrampilan untuk mengisinya. Dengan demikian investasi dalam pendidikan dan latihan adalah esensial dalam rangka strategi penempatan tenaga dan strategi pembangunan ekonomi pada umumnya.

Di banyak negara berkembang usaha perluasan kesempatan kerja sangat dipersulit oleh laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang tinggi. Negara-negara itu menjadi semakin sadar bahwa harus diambil tindakan-tindakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk itu. Walaupun tidak mempunyai akibat langsung atas persediaan tenaga kerja selama 15 tahun mendatang — tambahan angkatan kerja selama periode itu telah lahir — tindakan-tindakan itu mempunyai akibat tidak langsung dalam arti bahwa sumber-sumber daya yang perlu untuk memberikan sandang pangan, pendidikan, perumahan dan perawatan kesehatan kepada anak-anak yang akan dilahirkan kalau tiada program keluarga berencana dapat digunakan untuk maksud-maksud lain yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Untuk sebagian besar adalah negara-negara berkembang itu sendiri yang harus mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki situasi penempatan tenaga secara berangsur-angsur. Akan tetapi strategi pembangunan yang terarah pada penempatan tenaga juga mempunyai segi-segi internasional. Khususnya kebijaksanaan perdagangan negara-negara industri perlu ditinjau kembali. Dengan mengendorkan kebijaksanaan itu, khususnya hambatan-hambatan impor hasil-hasil produksi padat karya, negara-negara itu dapat memainkan peranan positif dalam pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja di negara-negara berkembang. Demikianpun ada baiknya lebih mengarahkan bantuan yang diberikan untuk merangsang dan menggalakkan perluasan kesempatan kerja, dengan menyalurkan lebih banyak dana ke sektor-sektor dan program-program yang lebih

## ANALISA

banyak menggunakan tenaga kerja, dengan menghilangkan ketentuan-ketentuan yang melarang digunakannya bantuan untuk membayar biaya-biaya lokal seperti upah tenaga kerja, atau dengan mengendorokan kebijaksanaan "bantuan yang mengikat" yang menuntut agar negara-negara penerima membeli perlengkapan dan kebutuhan lain dari negara donor, dan kerap kali mewajibkan pembelian jenis-jenis yang paling modern tetapi sedikit menyerap tenaga kerja.

Selain merumuskan tindakan-tindakan teknis kebijaksanaan ekonomi yang dapat menunjang perluasan kesempatan kerja, negara-negara yang bersangkutan harus memiliki kemauan politik untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Hambatan-hambatan politik tidak dapat dianggap sepi. Misalnya suatu pemerintah yang memerlukan dukungan tuan-tuan tanah akan menghadapi kesulitan untuk melaksanakan land reform, biarpun kebijaksanaan semacam itu mungkin perlu untuk melakukan perluasan kesempatan kerja dalam sektor pertanian. Kesukaran-kesukaran semacam itu bisa menghambat kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti pembaharuan fiskal yang direncanakan untuk melaksanakan pembagian kembali pendapatan nasional yang lebih baik. Susunan kekuasaan di banyak negeri berkembang adalah begitu rupa, sehingga banyak tindakan yang harus diambil untuk memperluas kesempatan kerja dan melaksanakan keadilan sosial banyak menghadapi oposisi. Namun hambatan-hambatan itu harus diatasi.

Jika pengangguran, yang sekarang ini telah mencapai tingkat yang menakutkan di banyak negeri berkembang dan cenderung untuk semakin meningkat, tidak ditanggulangi secara memadai, pertumbuhan ekonomi lambat laun akan dihentikan oleh suatu krisis politik, yang kemungkinan besar akan dibarengi oleh suatu pergolakan sosial yang berdarah. Kerugian yang akan diderita oleh masyarakat sebagai akibatnya dalam bidang ekonomi dan sosial akan sangat besar. Akan tetapi yang pertama-tama akan menjadi korban ialah golongan kepentingan yang kini menentang diadakannya pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan penempatan tena-

ga yang lebih tinggi. Oleh sebab itu merekapun harus memikirkan akibat-akibat semakin meningkatnya pengangguran dan ketidakstabilan. Dari lain pihak, dukungan mereka akan menunjang sukses kebijaksanaan penempatan tenaga dengan menjamin pelaksanaannya dan dengan menciptakan iklim sosial di mana kelompok-kelompok lain juga akan bersedia ikut serta dalam usaha bersama yang harus dilakukan.<sup>1</sup>

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan, bahwa dalam strategi pembangunan negara-negara berkembang, yang umumnya menghadapi masalah-masalah pengangguran dan kemiskinan yang luas, perluasan kesempatan kerja harus mendapat prioritas utama berupa alokasi dana dan tenaga yang lebih besar dari masa lampau. Harus diusahakan sekuat tenaga agar setiap orang yang mampu dan mau dapat bekerja secara produktif penuh dan mendapatkan balas karya yang wajar. Penempatan tenaga yang penuh (full employment) bukan saja akan memberantas kemiskinan dan akibat-akibatnya, melainkan juga meningkatkan produksi serta pendapatan nasional dan membaginya secara yang lebih merata. Dengan perkataan lain perluasan kesempatan kerja yang memadai akan sekaligus menjamin pertumbuhan ekonomi dan perataan pendapatan nasional yang wajar. Secara demikian kestabilan nasional juga akan lebih terjamin. Pengangguran yang luas dan kemiskinan akibatnya adalah semacam bom waktu yang cepat atau lambat akan meledak kalau tidak diberantas pada waktunya.

Perluasan kesempatan kerja itu juga merupakan sasaran pokok dalam strategi pembangunan di Indonesia seperti ditegaskan dalam GBHN 1978: "Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang di samping meningkatkan produksi nasional, maka pertumbuhan ekonomi harus mempercepat pula pertumbuhan lapangan kerja, karena pemberantasan pengangguran dengan jalan memperluas kesempatan kerja merupakan sasaran penting bagi Pembangunan Jangka Panjang, bukan saja karena kesempatan kerja memiliki nilai ekonomis, melainkan juga karena mengandung nilai kemanusiaan dengan menumbuhkan harga

1 Lihat *The World Employment Programme* (Jenewa: ILO, 1971)

diri, sehingga dengan demikian memberi isi kepada asas kemanusiaan.”

Kenyataannya pengangguran, khususnya setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, adalah sangat luas dan merupakan salah satu faktor utama kemiskinan dan akibat-akibat sosialnya. Berdasarkan sensus Pertanian 1973, Prof. Sayogyo memperkirakan bahwa dari 12,6 juta keluarga yang hidup di pedesaan Jawa sekitar 9 juta adalah keluarga petani gurem, yaitu petani yang rata-rata hanya menguasai areal tanah 0,25 ha, dan buruh tani.<sup>1</sup> Areal tanah sekecil itu jelas tidak dapat memberikan pekerjaan penuh kepada pemiliknya maupun pendapatan yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Untuk menghidupi keluarga mereka sepanjang tahun, petani-petani gurem itu terpaksa mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian guna memperoleh tambahan pendapatan. Hal ini lebih berlaku bagi buruh tani yang tidak menguasai tanah sama sekali. Akan tetapi pekerjaan di luar pertanian sulit didapat karena sektor industri masih sangat kecil dan umumnya padat modal, dan mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan serupa itu menghabiskan banyak waktu untuk mendapat penghasilan yang tidak seberapa. Umumnya pendapatan dari pekerjaan ini adalah lebih kecil dari pada pendapatan dari pekerjaan dalam pertanian.<sup>2</sup> Dengan demikian kurangnya kesempatan kerja yang produktif penuh merupakan salah satu masalah pokok di pedesaan Jawa, tempat tinggal lebih dari 80% penduduknya.

Oleh sebab itu perluasan kesempatan kerja harus mendapat prioritas. Sehubungan dengan ini GBHN lebih lanjut menandakan: "Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang tetap mendesak dalam Pelita Ketiga. Oleh karenanya diperlukan berbagai kebijaksanaan yang menyeluruh seperti pendidikan ketrampilan, pendidikan yang dapat menciptakan kegiatan kerja, pembangunan industri, pembangunan prasarana, penentuan skala prioritas investasi, kebijaksanaan perpajakan dan perkre-

1 Sayogyo, "Lapisan Masyarakat Paling Lemah di Pedesaan Jawa", *Prisma*, April 1978

2 William L. Collier, "Masalah Pangan, Pengangguran, dan Gerakan Penghijauan di Pedesaan Jawa", *Prisma*, Februari 1978

ditan, pemilihan teknologi yang tepat guna dan sebagainya. Di samping itu usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja juga perlu dituangkan dalam program-program khusus, antara lain dengan melanjutkan dan memperluas program bantuan pembangunan dan proyek padat karya di daerah pedesaan.”

Hal itu lebih lanjut ditandaskan di lain tempat dalam GBHN seperti berikut: ”Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan jalan demikian maka di samping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan.”

Bahwa kita harus mengusahakan perluasan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional Indonesia juga berulang kali ditegaskan oleh Presiden Soeharto. Antara lain dalam sambutannya pada hari raya 'Ied di Masjid Istiqlal 27 Oktober 1973 diutarakan: ”Kita harus memberantas kemiskinan itu langsung dari sumber dan akar-akarnya, baik kemiskinan lahir maupun kemiskinan rokhani. Dan satu-satunya jalan untuk itu adalah dengan melaksanakan pembangunan yang dapat memberantas sumber kemiskinan ini. Ini berarti kita laksanakan pembangunan yang dapat memberi kesempatan kerja pada setiap orang, pembangunan yang mampu memberikan perluasan lapangan pekerjaan, pembangunan yang dapat menaikkan penghasilan semua orang.”<sup>1</sup>

Hal itu tidaklah mudah, akan tetapi merupakan suatu keharusan. Negara wajib memberikan prioritas tinggi kepada penempatan seluruh tenaga kerja dan dalam rangka itu menyusun serta melaksanakan suatu strategi perluasan kesempatan kerja agar setiap orang yang mampu dapat bekerja secara

1 Dikutip dari Krissantono, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1976), hal. 71

## ANALISA

produktif dan mendapat imbalan yang layak. Hal ini diakui sepenuhnya dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945: "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya "memajukan kesejahteraan umum", Negara wajib mengusahakan agar setiap warga negara Indonesia dapat melaksanakan hak asasinya itu. Manusia tidak dapat hidup sejahtera lahir batin kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap sekalipun dicukupi kebutuhan materiilnya sehari-hari. Seperti dikemukakan di atas, pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi melainkan juga nilai kemanusiaan yang tinggi. Pada waktu yang sama negara wajib menjaga agar orang yang bekerja dapat bekerja dalam lingkungan sehat dengan syarat-syarat kerja yang baik dan mendapatkan balas karya yang wajar. Bagi kebanyakan orang kesempatan kerja adalah satu-satunya sumber kesejahteraan mereka dan keluarga mereka.

### MASIH TERSEDIA nomor-nomor ANALISA dan MONOGRAF tentang:

Ekonomi Dunia dan Sistem Kingston	Rp. 700,—
Ekonomi dan Masyarakat Manusiawi	Rp. 700,—
Pengawasan Pembangunan dan Anggaran Belanja Negara	Rp. 700,—
Beberapa Prospek Perkembangan Tahun 1977	Rp. 700,—
Beberapa Segi Pembangunan	Rp. 700,—
Beberapa Masalah Dalam Negeri	Rp. 700,—
Beberapa Ulasan Tahun 1977	Rp. 700,—
Beberapa Pemikiran tentang Mempertinggi Kapabilitas dan Kapasitas	
Bank-bank Swasta Nasional (J. Panglaykim)	Rp. 700,—
Kredit Macet, Dilemma Masa Kini (Kwik Kian Gie)	Rp. 700,—
Jepang dan Politik Ekonomi Luar Negerinya	Rp. 700,—
Masalah Dana Internasional dan Nasional	Rp. 700,—



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku yang membahas masalah-masalah sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, strategi, pemerintahan, ideologi dan hubungan internasional yang sangat luas.



#### ANALISA

*terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—*



#### RINGKASAN PERISTIWA

*majalah dwipekan, berisikan ringkasan peristiwa di dalam negeri (politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan dan hankam) dan dunia internasional yang kompleks sifatnya, bersumberkan surat kabar, buletin serta majalah dalam dan luar negeri. Majalah ini merupakan salah satu sumber penulisan buku 'Indonesia dan Dunia Internasional' yang diterbitkan setiap tahun oleh CSIS. Harga per eks Rp. 350,— langganan setahun (24 nomor) Rp. 8.400,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 6.720,—*



#### THE INDONESIAN QUARTERLY

*Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,— langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,— Jilidan Vol. I, II, III, V a Rp. 4.000,—, Vol IV Rp. 2.500,—*



CSIS juga menyediakan perpustakaan dan clippings yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada: Biro Publikasi — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES  
 Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat      Telepon 349489

